

Judul : Kedaulatan ekonomi berpihak ke rakyat, fraksi PKB dukung bea keluar batu bara
Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kedaulatan Ekonomi Berpihak Ke Rakyat Fraksi PKB Dukung Bea Keluar Batu Bara

KETUA Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan kebijakan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batu bara. Langkah ini dinilai sebagai terobosan berani untuk mengakhiri anomali penerimaan negara.

Selama ini, kata dia, negara justru merugi akibat skema restitusi pajak di sektor pertambangan. Sehingga kebijakan bea keluar untuk ekspor batu bara merupakan wujud nyata dari kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat sebagai amanat UUD 1945 Pasal 33.

"Sudah saatnya negara mendapatkan kompensasi yang adil dari pengerukan kekayaan alam yang dilakukan secara masif oleh korporasi," kata Jazilul dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Dia bilang, tidak masuk akal jika negara justru 'tekor' karena memberikan subsidi lewat restitusi pajak kepada perusahaan batu bara yang sudah sangat mapan dan kaya. Kebijakan BK ini adalah langkah korektif memastikan kekayaan alam kita benar-benar memberikan manfaat bagi publik.

Selama ini, sambungnya, industri batu bara jadi primadona ekonomi, namun seringkali meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang biaya pemulihannya justru dibebankan kepada negara dan masyarakat. Dengan adanya tarif BK, Pemerintah bisa mengumpulkan dana cadangan untuk pembangunan dan perbaikan lingkungan.

"Dengan adanya BK ini, kita mengubah ekosistem industri agar lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik," ujar legislator asal Dapil Jatim X itu.

Dia mengungkapkan, pemain besar di industri batu bara Indonesia telah menikmati keuntungan luar biasa dalam be-

berapa tahun terakhir. Akumulasi laba bersih dari perusahaan-perusahaan batubara raksasa di Indonesia jika ditotal menembus ratusan triliun rupiah per tahun saat harga komoditas melonjak.

"Bahkan banyak perusahaan tambang besar mencatatkan margin laba bersih yang sangat tinggi, jauh di atas industri manufaktur atau jasa lainnya," ujar politikus yang karib disapa Gus Jazil itu.

Dia mengimbau para pengusaha batu bara agar bersikap kooperatif dan menerima kebijakan ini dengan jiwa besar. Diingatkan, keberlangsungan bisnis mereka juga bergantung pada stabilitas sosial dan ekonomi negara.

"Berkontribusi sedikit lebih banyak lewat BK tidak akan membuat perusahaan bangkrut, namun justru akan membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tegasnya.

Hingga kini, Pemerintah masih menyusun skema kebijakan pungutan bea keluar atas ekspor komoditas batu bara, yang direncanakan berlaku pada tahun ini. Menteri Purbaya menyebut besaran tarif BK batu bara akan disesuaikan dengan harga acuan komoditas di pasar global. Tarifnya juga bakal bervariasi dari 5-11 persen.

"Itu masih pembahasan, kalau nggak salah diusulkan tergantung harga batu bara ya, ada 5 persen, 8 persen, ada 11 persen, tergantung level harga batu baranya," terang Purbaya belum lama ini.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan BK batu bara hanya diterapkan saat harga komoditas emas hitam itu tinggi di pasar. Dengan kata lain, otoritas pertambangan negara memastikan Pemerintah tidak bakal memungut BK saat harga batu bara melemah, yang dikhawatirkan akan menggerus margin. ■ PYB